

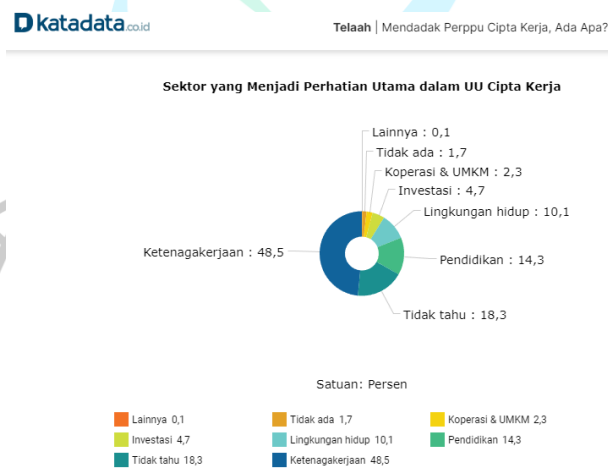
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengumuman Peraturan dalam Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kesempatan Kerja pada 30 Desember 2022 membuat media nasional meliput pemberitaan terkait tokoh kunci yang bertanggung jawab atas pemberlakuannya, yakni Presiden Joko Widodo seorang. Sekadar diketahui, Undang-undang yang mengatur beberapa aspek ketenagakerjaan adalah Perppu no. 2/2022 tentang Cipta Kerja. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk sementara dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki landasan yang jelas; akibatnya, amandemen harus dilakukan dalam waktu dua tahun setelah keputusan pengadilan (Sufa, 2023).

Selain itu, merujuk pada katadata.co.id, UU Cipta Kerja juga sebelumnya masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dengan sektor yang menjadi perhatian terbesar yakni mengenai ketenagakerjaan sebesar 48,5%, yang diikuti oleh sektor pendidikan sebanyak 14,3 dan beberapa sektor lainnya.



Gambar 1. 1 Sektor Perhatian Utama UU Cipta Kerja
(Sumber: katadata.co.id, 2023)

Penerbitan Perppu merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memitigasi berbagai risiko terhadap perekonomian nasional dan mengatasi ancaman global (Natalia, 2023), serta mengisi kekosongan hukum yang tidak dapat

diatasi dengan proses waktu yang lama seperti memperbaiki UU Cipta Kerja. Kendati demikian, Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo ini menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil yang berpendapat bahwa pembuatan Perppu mengabaikan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembuatan Undang – undang yang begitu penting (Herlinda & Janti, 2023), dan Presiden Joko Widodo dikatakan melanggar hukum dengan memilih jalan pintas, yakni menerbitkan Perppu, untuk mempercepat proses perubahan undang-undang yang ada.

Meninjau data dari trends.google.com, kata Perppu Cipta Kerja berhasil menduduki posisi Ke-8 pada 2 Januari 2023 dengan total lebih dari 20 ribu pencarian. Menjadi suatu informasi yang memiliki dampak yang besar, berbagai isu cluster di Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi tersebut kemudian memicu perbincangan hangat di media online dan mengundang media – media untuk menulis berita terkait sosok Presiden Joko Widodo dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dengan banyaknya informasi mengenai Perppu Cipta Kerja yang beredar, maka Perppu Cipta Kerja perlu dipahami secara utuh untuk menghindari adanya salah paham dan timbulnya hoaks. Berdasarkan indonesia.go.id (2023), beberapa informasi berita yang beredar dan menjadi kekhawatiran di kalangan masyarakat diantaranya ialah terkait PHK sepihak dan waktu istirahat pekerja, yang sebenarnya akan tetap dilindungi dan diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Merujuk pada hal tersebut, maka perlu dibangun adanya penyampaian berita dengan penyajian fakta dan data, serta narasi yang baik dalam merespon adanya berita – berita negatif untuk mengedukasi masyarakat (Laraspati, 2023).

Berita atau informasi pada dasarnya mengacu pada penyebaran cepat peristiwa atau pesan penting dan akurat kepada khalayak luas melalui saluran media berkala (Juditha, 2013:147). Adapun definisi berita lainnya adalah hasil dari konstruksi sosial yang mencakup paradigma, ideologi, serta nilai – nilai jurnalis atau media massa berdasarkan interpretasi faktual (Pramono, 2015:5-6). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa berita yang disajikan oleh media massa merupakan suatu karya jurnalistik yang ditulis atau dikonstruksikan berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya, atas kejadian terbaru dimana perlu diketahui oleh masyarakat.

Media massa sendiri merupakan saluran atau sarana penyampaian pesan kepada massa yang hadir dalam berbagai macam bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat luas (Egan, 2016:1). Tak lepas dari perkembangan internet, media online menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia jurnalistik untuk menyampaikan suatu berita. Dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pesan, hal ini kemudian melahirkan jurnalistik yang berbentuk online. Menurut Romli (2018:16), jurnalisme online dicirikan sebagai metode penyampaian berita atau informasi melalui platform media digital. Kini masyarakat bisa mendapatkan berita tidak hanya melalui televisi, tetapi dimana saja selama terhubung dengan adanya internet melalui perangkat komputer, telfon genggam, maupun laptop (Pramono, 2015:5).

Berbeda dengan jurnalistik konvensional, jurnalistik online merupakan jenis jurnalistik baru yang dilengkapi dengan fitur unik, serta menawarkan kemungkinan tak terbatas dalam pemrosesan dan penyiaran berita (Juditha, 2013:146). Berita kini dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Jurnalisme online sendiri ialah kegiatan dengan multimedia yang berbeda untuk membuat berita yang memperkenankan interaksi dua arah untuk mengaitkan potongan informasi yang berbeda dari sumber online lainnya (Romli, 2018:18). Dengan hadirnya media online, penyajian berita dapat dilengkapi dengan suara dan gambar (audio – video), tidak hanya dengan sekedar teks berita dan foto (Romli, 2018:18).

Meningkatnya pemberitaan seputar Perppu ini diawali sejak Presiden Jokowi menerbitkan Undang – undang pada 30 Desember 2022, menghiasi halaman utama media massa, termasuk diantaranya yakni Detik serta CNN Indonesia. Berdasarkan observasi peneliti, 172 berita ditemukan pada situs Detik.com melalui kata kunci ‘Perppu Cipta Kerja’ selama periode Desember 2022 sampai dengan periode Januari 2023. Pada CNNIndonesia.com peneliti, mendapatkan sebanyak 169 berita melalui kata kunci ‘Perppu Cipta Kerja’ pada periode yang sama yang terhitung dari 12 Maret 2023.

Tabel 1. 1 Artikel Berita Detik.com dan CNNIndonesia.com

Artikel Detik.com	Artikel CNNIndonesia.com
<p><i>Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan</i></p>	<p><i>Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal-akalan Jokowi</i></p>
	

Sumber: Detik.com & CNNIndonesia.com, 2023

Kedua artikel berita online yang dilampirkan pada tabel tersebut memiliki headline dengan pandangnya masing – masing terkait penerbitan Perppu dengan menyorot Presiden Jokowi yang memiliki peran besar dan juga dimana hal tersebut dianggap merugikan untuk beberapa pihak. Meluasnya kabar berita mengenai Perppu Cipta Kerja kemudian diwarnai dengan adanya penolakan dari serikat buruh terkait sejumlah pasal yang dapat merugikan para pekerja dan dapat berpotensi multitafsir dalam isi Perppu Cipta Kerja (Rosman, 2023).

Adapun hal tersebut juga menimbulkan adanya aksi unjuk rasa oleh kelompok buruh yang terjadi pada 14 Januari 2023, dengan total 9 hal yang menjadi sorotan yaitu: upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, jam operasional, hari bertugas, tenaga kerja internasional, sanksi hukum atas pelanggaran, dan penutupan kerja (Arief, 2023). Selain itu, terdapat sejumlah kritik – kritik yang disampaikan melalui media sosial Twitter, dimana masyarakat Indonesia memberikan beragam tanggapan terkait terbitnya Perppu tersebut. Seperti yang disampaikan oleh akun @Julian303 yang menyatakan, “Perpu ini merugikan buruh, memperkaya taipan pensiunan buruh akan semakin melarat”. Kemudian cuitan dari @MakrufMu, yang mengatakan, “Kalau UU Ciptaker itu ditolak MK salah satunya alasannya adalah inkonstitusional bersyarat, harusnya yang diperbaiki adalah syarat kekonstitusionalnya, bukan malah menerbitkan Perppu”. Lalu terdapat pula pendapat lainnya dari @Irvaninsanulm, “Negara maju lain berusaha jadiin hari kerja cuma 4 hari, ini malah ditambahin suruh kerja 6 hari”.

Beragam opini dan kritik tersebut terekam jelas di media sosial Twitter dengan total tweets sebanyak 625 per 13 Februari sampai 20 Februari 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari dash.tweetbinder.com melalui hashtag

#PerppuCiptaker. Adapun melalui trackmyhashtag.com dengan total impressions sebanyak 192,307 per 13 Februari sampai dengan 20 Februari 2023. Terjadinya keberagaman pendapat atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 ini kemudian mengundang media – media untuk menjadikannya sebagai bahan berita dengan menyorot sosok Presiden Joko Widodo yang berperan besar dalam penerbitan Undang – undang tersebut. Seperti halnya pemberitaan yang dilakukan oleh Detik dan juga CNN Indonesia.

Pemberitaan di media online sendiri rawan akan kesalahan karena pemberitaan di media online mengejar ketepatan waktu berita dan terkadang melebihi akurasi faktual (Faisal, 2021: 85). Media massa juga memiliki latar belakang yang berbeda serta kepentingan – kepentingannya tersendiri dalam pengemasan berita. Selain itu, keterampilan jurnalis juga relatif berbeda satu sama lain dalam menulis suatu berita yang objektif, sehingga yang terjadi adalah berita yang subjektif (Juditha, 2013:147). Pengemasan berita sendiri memiliki potensi menonjolnya suatu makna atau pesan tertentu pada isinya. Karena pada dasarnya, media dalam memproduksi berita memiliki frame atau cara pengemasannya sendiri untuk menekankan aspek tertentu melalui rangkaian kata, aksen, gambar, dan perangkat – perangkat lainnya (Febriyanti & Karina, 2021:147)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peneliti penelitian ini ingin menyelidiki penelitian sebelumnya mengenai kejadian tersebut, dengan menggunakan metode yang dicetuskan oleh Pan & Kosicki mengenai framing untuk menjelaskan secara menyeluruh penggambaran Presiden Joko Widodo dalam pemberitaan terkait keluarnya Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com. Jenis penelitian framing sendiri diartikan sebuah analisis yang mengungkap bagaimana suatu realitas dibangun oleh media (Alverina, 2015: 9-10). Adapun model analisis tersebut digunakan untuk menekankan analisis retorik atau penekanan pada penggunaan kata dan frase yang digunakan pada penulisan berita. Metode ini juga berbeda dengan analisis framing dari banyak ahli lain karena tidak merinci penekanan di balik penggunaan kata, melainkan memilih dan menekankan pertanyaan (Egan, 2016:8).

Sebagai informasi, dikatakan bahwa setidaknya Presiden Joko Widodo memiliki sejumlah menteri, wakil menteri, dan staff khusus yang berlatar belakang

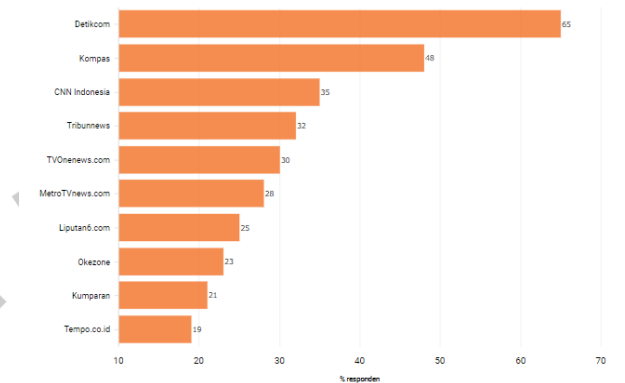
konglomerat pemilik grup media di Indonesia, yang salah satunya disini adalah anggota keluarga dari konglomerat Chairul Tanjung yang kerap disapa sebagai pemilik CT Corporation (Sukirno, 2019). Sebagaimana diketahui secara luas, Detik.com dan CNNIndonesia.com adalah platform berita digital yang berjalan di bawah payung bersama CT Corporation, yang dimiliki oleh Chairul Tanjung. Selain itu, setelah mencermati pemberitaan mengenai penerbitan Perppu Cipta Kerja Presiden Joko Widodo baik dari Detik.com maupun CNNIndonesia.com, para peneliti menemukan perspektif dan proses berpikir yang berbeda dalam cara penyajian berita di platform-platform tersebut.

Perbedaan tersebut tergambar secara jelas pada berita di Detik.com dengan headline “Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Perang Ukraina Disinggung” dan CNNIndonesia.com dengan headline “Perang Rusia – Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja”. Memiliki kesan yang serupa, pada headline CNN Indonesia menekankan kata ‘dalih’ yang dimana berdasarkan KBBI, istilah ini mengacu pada ‘alasan yang dicari - suatu upaya untuk memberikan pembenaran atas suatu tindakan.’ Pemilihan diksi tersebut tentunya dapat mempengaruhi interpretasi masyarakat dalam membaca suatu berita, terlebih pada sebuah judul.

Menurut Kurniasari et al. (2019:100), media massa tidak sekedar menampilkan peristiwa ala kadarnya, tetapi juga memiliki ketergantungan terhadap kelompok atau pemilik yang mendominasi. Dengan kata lain, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan unsur kepemilikan juga mempengaruhi dua media, Detik.com dan CNNIndonesia.com, yang dibawah CT Corporation. Adanya unsur kepemilikan media dapat memberikan keberagaman sudut pandang, dimana pemilik media sendiri berperan besar dan cenderung memiliki bias atau preferensi pada media yang dikendalikan (Widiastuti, 2016).

Selain itu, CNNIndonesia.com juga merupakan salah satu bagian dari Cable News Network yang merupakan saluran berita dan situs web berita multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Selama bertahun – tahun, CNN telah meluncurkan jaringan di beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia. Sementara itu, platform berita digital Detik.com merupakan media online dalam negeri. Melihat data yang disajikan oleh Reuters Institute melalui

databoks.katadata.co.id terkait statistik pengunjung media online terbanyak di Indonesia, dapat terlihat juga bahwa kedua media online tersebut menduduki posisi 3 teratas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 1. 2 Statistik Portal Media Online Detik dan CNN Indonesia
(Sumber: databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, maka timbul pertanyaan peneliti tentang bagaimana pengemasan, Begitu pula dengan framing yang dilakukan dua media tersebut, yang keduanya dibawah oleh payung yang sama, terkait Presiden Joko Widodo. Bahwasannya, beliau sendiri memiliki peran besar dalam menerbitkan Perppu lalu yang dianggap telah melewati berbagai proses dalam menerbitkan Undang – undang serta mengabaikan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembuatan Undang – undang yang begitu penting. Sebagaimana framing sendiri merupakan sebuah metode media dalam melakukan penekanan terkait bagian mana yang ingin ditonjolkan dalam sebuah berita, maka penting untuk diketahui bagaimana media dalam fenomena Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 ini menggambarkan sosok penting dalam penerbitannya yang disebarluaskan ke masyarakat luas.

Sebagai rujukan untuk melakukan penelitian, peneliti juga akan meninjau beberapa penelitian – penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang pertama dengan judul “Bingkai Demokratisasi Isu Pengesahan UU Cipta Kerja (Analisis Framing Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Pada Media Dalam Jaringan Kompas. Com Dan Tribunnews. Com)”, dimana dikarang oleh Yuris Lussy dan Farid Pribadi, penelitian ini mengungkapkan bahwa Kompas.com menunjukkan

bias terhadap lembaga legislatif dan pemerintah. Sebaliknya, Tribunnews.com tetap menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap proses legislasi seputar pengesahan RUU Cipta Kerja pada Oktober 2020.

Kemudian penelitian kedua dengan judul “Pembingkai Editorial Media Indonesia dan Kompas Terhadap Isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”, ditulis oleh Retna Intendyah dan Hendra Setiawan, Pemberitaan media yang dihadirkan Kompas dan Media Indonesia sebagai reaksi atas terbitnya Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 diperdaam di penelitian ini dengan framing Pan & Kosicki. Hasilnya menyoroti adanya hal berbeda dalam konstruksi realitas, dimana Kompas menegaskan netralitasnya dan memberikan informasi faktual kepada masyarakat untuk membentuk perspektif mereka sendiri. Di sisi lain, Media Indonesia cenderung memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan lebih sejalan dengan sudut pandang masyarakat.

Penelitian yang ketiga dengan judul “Bingkai sosok Jokowi sebagai Presiden dalam pemberitaan setahun pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas edisi 19-21 Oktober 2015”, dengan teknik framing Pan & Kosicki, dan ditulis oleh Putra Aditya Lapalelo. Hasilnya, harian Jawa Pos dan Kompas menampilkan karakter Jokowi dengan cara berbeda. Kompas menggambarkan Jokowi sebagai orang yang siap menghadapi kesulitan, namun terhambat oleh ketidakmampuan para menterinya dan pengaruh kepentingan partai politik, sedangkan Jawa Pos menggambarkannya sebagai orang yang rentan terhadap tekanan-tekanan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana kajian penggambaran Presiden Joko Widodo dalam pemberitaan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online menggambarkan Presiden Jokowi dalam pemberitaan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Kelak penelitian dapat menambahkan apa yang telah diketahui dalam bidang ilmu komunikasi., khususnya dalam penelitian framing. Selain itu, diharapkan dapat menyumbangkan wawasan yang mendorong kemajuan penelitian tentang beragam subjek dan peristiwa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bahwasannya media memiliki peranan yang penting sebagai sarana dalam memperhatikan dan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah seperti terbitnya Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, maka tujuannya agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengamat politik, cendekiawan, media analis, maupun masyarakat akademis untuk dapat memperdalam pengetahuan terkait bagaimana media massa mbingkai atau menggambarkan tokoh politik besar yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti halnya Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

